



KR-Antara/Irfan Sumanjaya

DAMPAK BANJIR LAHAR HUJAN: Sejumlah warga menggondong siswa Sekolah Dasar (SD) untuk berangkat sekolah melintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Regoyo di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/4/2024). Sebanyak 40 siswa SDN Jugosari 3 terpaksa menyeberangi sungai disebabkan jembatan limpas sebagai akses utama menuju sekolah terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru.

AKIBAT PERUBAHAN IKLIM 2024

Kasus DBD Melonjak

JAKARTA (KR) - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi mengatakan, pada 2023 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berhasil diturunkan dari 143.000 kasus ke 115.000 kasus. Namun perubahan iklim pada 2024 membuat kasusnya kembali naik.

Oleh karena itu, kata Imran, sistem diagnosis dengue perlu ditingkatkan agar dapat mengetahui penyakit yang bersifat zoonosis serta yang disebabkan oleh lingkungan.

"Kita butuh deteksi, seperti yang Pak Menteri Kesehatan bilang, yang menyebut tentang rapid test, karena ini perlu didistribusikan di Fasilitas Kesehatan Dasar kita, karena dengue memi-

liki (konsekuensi) yang parah apabila telat ditangani," ujarnya dalam Arbovirus Summit yang disiarkan di kanal YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Senin (22/4).

Imran Pambudi juga mengatakan, setelah pandemi Covid-19, gejala-gejala dengue sudah tidak lagi berupa gejala klasik, sehingga perlu diwaspadai. Menurutnya, sekitar 50 persen kasus

dengue tidak memiliki gejala. Oleh karena itu, kata Imran, perlu adanya sistem yang sensitif guna mendeteksi penyakit tersebut.

Sistem tersebut, katanya, harus dapat mendeteksi penyakit baik yang ditularkan melalui binatang atau disebabkan karena lingkungan, termasuk yang terdampak perubahan iklim.

"Perubahan iklim tak hanya membebani pelayanan kesehatan, karena membuat kasus semakin naik dan naik, tetapi kami juga menimbang bahwa perubahan iklim akan membebani sistem kesehatan. Sebagai contoh, kekeringan," katanya.

Ketika desa diterpa kekeringan, jelasnya, orang-orang pun pindah ke kota. Ketika pindah ke kota,

maka kota semakin padat dan hal itu dapat membuat kasus semakin naik.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut, penyakit-penyakit arboviral mengancam kesehatan serta perekonomian secara global. Tedros mengatakan, cakupan geografis arbovirus semakin besar karena adanya urbanisasi, perubahan iklim, serta penambahan populasi nyamuk yang sangat cepat.

"Pada 2023 lebih dari 6 juta kasus dengue dilaporkan secara global dan sekitar 3 juta kasus sudah dilaporkan tahun ini, meskipun musim pancaroba paling intens belum mulai di sejumlah daerah," katanya. **(Ant/San)-d**

BERDASARKAN UU DKJ

Jakarta Jadi Pusat Perdagangan Dunia

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengembangkan Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia.

Pasalnya, kata Suhajar Diantoro, Jakarta diberikan banyak kewenangan khusus di bidang perdagangan dalam UU yang telah disetujui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 itu.

"Kami menaruh harapan banyak agar kewenangan yang diberikan ini mampu menumbuhkembangkan DKJ sebagai pusat perdagangan dunia, bukan hanya mempertahankan posisi DKJ sebagai pusat perdagangan RI," kata Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 bertajuk UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota di Jakarta, Senin (22/4).

Suhajar menuturkan, saat menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta selama bertahun-tahun telah terbentuk menjadi daerah dengan perdagangan dan perekonomian yang maju, ditandai dengan lebih dari 17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dihasilkan di Kota Jakarta.

Untuk itu saat Jakarta tak lagi menyang status DKI dan menjadi DKJ, ia mengatakan, Jakarta akan menjadi provinsi khusus yang dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan kota global. Oleh karenanya dalam UU DKJ, lanjutnya, Pemerintah bersama DPR memberikan banyak kewenangan khusus kepada Jakarta di berbagai bidang, salah satunya perdagangan, yang meliputi kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi perlindungan konsumen.

Secara terinci, Suhajar menyebutkan, subbidang perizinan dan pendaftaran perusahaan mencakup penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya dan pusat perbelanjaan. Kemudian, subbidang stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting mencakup penjaminan ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan penting, pemantauan harga dan stok barang, serta operasi pasar.

Ditambahkan, subbidang pengembangan ekspor mencakup penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor serta DKJ skala nasional dan internasional. **(Ant/San)-d**

BRI LIGA 1 2023/2024

Persis Gulung Persikabo 1973

SURAKARTA (KR) - Persis Solo sukses memetik kemenangan di pekan ke 32 BRI Liga 1 2023/ 2024. Menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Manahan Surakarta, Senin (22/4) sore, Persis menang dua gol tanpa balas.

Sejak menit awal, tuan rumah langsung ngegas. Alexis Messidoro membuat percobaan pertama, namun bisa dihentikan Diky Indriyana. Tekanan Persis berbuah menit 18. David Gonzalez sukses mengkonversi umpan tarik dari Zanadin Fariz dari sisi kanan. Persis unggul 1-0.

Tak butuh waktu lama bagi Laskar Sambernyawa untuk menggandakan keunggulan. Zanadin mencatatkan namanya di papan skor setelah mengakhiri umpan Althaf Indie. Keunggulan 2-0 Persis bertahan hingga turun minum.

Babak kedua, Persis tak menyurutkan serangan. Hanya saja, beberapa peluang Persis tak berbuah gol. Persikabo pun tak tinggal diam dan melakukan beberapa ancaman, namun belum menghasilkan gol.

Arkhan Kaka hampir membawa Persis menjauh, tapi sepakannya masih melebar. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk tuan rumah tak berubah. Persis naik ke urutan enam dengan 47 poin, sementara Persikabo masih di juru kunci dengan 20 poin. **(Yud)-d**

WINGS AIR PASTIKAN PENERBANGAN NORMAL

AirNav Bantah Pesawat Jatuh di NTT

JAKARTA (KR) - Perusahaan Umum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia memastikan informasi perihal adanya pesawat terbang rendah dan jatuh di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah tidak benar atau hoaks. AirNav Indonesia menindaklanjuti informasi yang tersebar di kalangan media perihal adanya pesawat terbang rendah yang jatuh di perairan Bengga Nagekeo antara Bajawa-Ruteng Kupang NTT.

"Merujuk hal tersebut, AirNav Indonesia sebagai BUMN pemandu pelayanan lalu lintas penerbangan dapat menyimpulkan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar atau hoaks," kata Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/4).

Menurutnya, hingga pernyataan ini dikeluarkan, wilayah kerja AirNav Cabang Kupang memastikan semua pesawat yang beroperasi di wilayah yurisdiksi cabang Kupang normal beroperasi. "Cabang Kupang juga telah berkoordinasi dengan Flight Information Centre (FIC)

Bali Sector bahwa tidak ada indikasi terdapat pesawat yang mengalami accident," ujar Hermana.

Selain itu, lanjutnya, pihak maskapai Lion Air juga sudah menghubungi AirNav Indonesia Cabang Kupang bahwa semua pesawat normal beroperasi. "AirNav Indonesia Unit Ruteng tetap monitor perkembangan pencarian kebenaran berita dimaksud dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak KP3U (Kantor Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Udara) Polres Ruteng," tambah Hermana.

Sebelumnya, maskapai Wings Air juga mengatakan informasi dugaan hilang kontak salah satu pesawat di wilayah NTT tidak benar. "Wings Air dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Senin (22/4).

Wings Air memastikan kepada masyarakat luas bahwa seluruh operasi penerbangan Wings Air, termasuk yang beroperasi di Pulau Flores, NTT pada Senin berjalan dengan normal, menurut standar operasional prosedur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. **(Ant/Has)-d**

PETAHANA DAN PENJABAT MAJU PILKADA

Bawaslu DIY Cegah Potensi Pelanggaran

YOGYA (KR) - Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 baru akan berlangsung November mendatang, untuk mengantisipasi adanya potensi pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY akan melakukan pengawasan khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.

Pengawasan khusus dilakukan mengingat sejumlah nama petahana dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah maupun Anggota DPRD Kabupaten/Kota disinyalir akan ikut maju bertarung memperebutkan kursi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di DIY.

Potensi pelanggaran dikhawatirkan terjadi karena petahana maupun penjabat walikota/bupati yang maju Pilkada tidak harus mundur dari jabatannya.

"Kepala daerah petahana maupun peserta Pemilu 2024 lalu yang berasal dari kalangan legislatif juga tak perlu mundur jika punya

hajat maju dalam Pilkada nanti. Anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu bisa mencalonkan diri ikut bursa kepala daerah tanpa mengundurkan diri. Jadi untuk mengantisipasi adanya potensi pelanggaran akan dilakukan pengawasan khusus," kata Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib di Yogyakarta, Senin (22/4).

Najib mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu DIY adalah soal larangan mutasi jabatan menjelang Pilkada yang merujuk pada Pasal 71 ayat 2 Undang Undang No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam pasal tersebut diatur salah satunya bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan atau terakhir pada 22 Maret lalu, lantaran penetapan calon kepala daerah berlangsung

pada 22 September mendatang.

"Perlu diketahui semua kepala daerah terikat dengan aturan itu, bukan hanya petahana tapi yang berstatus Pj juga demikian. Artinya kalau mau melakukan mutasi setelah 22 Maret harus mendapat persetujuan Kemendagri," ungkapnya.

Menurut Najib, sejumlah indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh kepala daerah petahana dan yang berstatus Pj tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu apabila belum resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu jika menemukan adanya indikasi pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

"Jadi dalam konteks ini kalau kita menemukan pelanggaran tentu akan koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang (untuk melakukan pengawasan atau penindakan)," ungkapnya. **(Ria)-d**

KORUPSI PENGADAAN APD KEMENKES

KPK Panggil Perwakilan Tiga Perusahaan

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil perwakilan dari tiga perusahaan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Para saksi tersebut yakni Direktur Utama PT DS Solution Internasional Ferdian, Komisaris PT Nawamaja Silatama Agus Subarkah, dan Direktur PT Tria Dipa Medika Dewi Affatia. Selain itu tim penyidik KPK juga turut memeriksa satu orang dokter bersama Afnizal sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan

KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/4).

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. "Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," katanya.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes

Tahun 2020. Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp 3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi. Sejumlah pejabat turut diperiksa penyidik KPK terkait perkara tersebut antara lain Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. Pejabat lain yang turut diperiksa KPK yakni Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo. **(Ant/Has)-d**



KR-Antara/Anis Efizudin

TARIF CUKAI TEMBAKAU: Pekerja menyelesaikan pembuatan cerutu di pabrik cerutu Rizona Temanggung, Jawa Tengah, Senin (22/4/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen dan cukai rokok elektrik sebesar 15 persen pada tahun 2024.